

**Peran Abdurahman Wahid Dalam Politik Di Indonesia
(1999-2001)**



SKRIPSI

Diajukan

**untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)**

Jurusan Politik Islam

Oleh :

**Epran Aprianto
NIM. 09421003**

**JURUSAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2015

Motto

“Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. Al Baqarah : 286)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- *Ayahanda (Arfe'i) dan Ibunda (Amina) yang telah banyak berkorban baik moril dan material sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.*
- *Adinda Eriyadi, Yayan Setiawan, dan Mesi Amanda dan keluarga besarnya yang telah memberikan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan studi ini.*
- *Dan tak lupa pacarku Hastrianah yang selalu memberikan dukungan.*
- *Semua teman-teman dan dosenku, terima kasih support yang telah kalian berikan.*
- *Almamater ku*

INTISARI

*Program Studi Politik Islam
Program Strata 1 Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Skripsi, 2015*

**Epran Aprianto, Peran Abdurahman Wahid Dalam Politik Di Indonesia (1999-2001)
V + 64 Lembar + Lampiran**

Skripsi ini berjudul “Peran Abdurahman Wahid Dalam Politik Di Indonesia (1999-2001)”, Latar belakang penelitian ini adalah upaya pemerintahan reformasi dalam membangun pemerintahan yang lebih demokratis setelah runtuhnya Orde Baru. Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah Bagaimana Peran Abdurahman Wahid Dalam Politik Di Indonesia(1999-2001)?, dan bagaimana kebijakan-kebijakan kontroversional Abdurahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia?. Tujuan dari penelitian ini Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peran Abdurahman Wahid dalam politik di Indonesia (1999-2001), Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan kontroversional Abdurahman Wahid. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan metode atau cara dalam penyusunan proposal ini adalah penelitian pustaka (*library research*). jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah jenis data kualitatif dari sumber tertulis, *Sumber data primer* yang digunakan oleh peneliti adalah buku-buku yang terkait dengan Abdurahman Wahid, *Sumber data sekunder* yang digunakan oleh peneliti adalah Majalah, Jurnal, Makalah dan dokumen-dokumen serta sarana informasi lainnya. Setelah data yang berhubungan dengan permasalahan terkumpul penulis menganalisa data tersebut dengan Teknik Analisis Deskriptif kualitatif. Teknik Analisis Deskriptif kualitatif merupakan tehnik yang digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan adanya kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan yang dianggap penting.

Setelah dilakukan penelitian maka peneliti mendapatkan kesimpulan, pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid bertahan 22 bulan, banyak kebijakan kebijakan Presiden yang mengalami delegitimasi politik dan sosial yang mengakibatkan K.H. Abdurrahman Wahid lengser dari jabatannya.

Ide-ide sosial politik yang diperjuangkan didunia politik Indonesia. *Pertama*, dalam hal Demokratisasi di Indonesia, Abdurahman Wahid memperjuangkan kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, pluralism dan humanisme. *Kedua*, pluralisme dalam menjaga dinamisasi keagamaan. *Ketiga*, nasionalisme, Abdurahman Wahid memperjuangkan dan mempertahankan NKRI dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puja dan puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, juga sumber kunci perbendaharaan ilmu itu hanya ada pada genggamannya. Shalawat serta salam semoga abadi tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil membimbing dan menuntun umatnya ke jalan yang benar dan di ridloi Allah SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Peran Abdurahman Wahid Dalam Politik Di Indonesia (1999-2001)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum) pada Fakultas Adab Universitas Islam Negeri (UIN RAFAH) Raden Fatah Palembang. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis karena dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari uluran tangan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, M.A. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.

2. Bapak Prof. Dr. H. J. Suyuthi Pulungan, M.A. selaku Dekan Fakultas Adab dan sebagai Pembimbing 1.
3. Ottoman, S. S, M. Hum selaku Ketua Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam.
4. Bapak Imron, M.A, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh pihak, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah jualah yang membalas segala bantuannya.
6. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmat dan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulis hanya bisa mendo'akan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan tangan terbuka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan penyusunan skripsi ini yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. *Amiin Ya Robbal 'Aalamiin.*

Palembang, Mei 2015
Penulis

Epran Aprianto
NIM. 09 421 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
INTISARI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
 BAB II BIOGRAFI ABDURAHMAN WAHID DAN LATAR	
 BELAKANG PEMIKIRANNYA	17
A. Latar Belakang Keluarga	17
B. Riwayat Pendidikan	21
C. Perjalanan Karir	27
D. Riwayat Pemikiran	29

E.. Nahdlatul Ulama (NU)	33
F.. Karya-Karya Intelektual K.H. Abdurahman Wahid	40

BAB III ABDURAHMAN WAHID DALAM POLITIK DI INDONESIA (1999-2001)

A. Peran Abdurahman Wahid dalam politik di Indonesia	42
B. Pemerintahan Abdurahman Wahid (1999-2001)	48
1) Dibidang Politik	49
2) Dibidang Ekonomi	52
3) Dibidang Militer	54
4) Dibidang Hukum	55
5) Dibidang Sosial dan Budaya	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran lebih menunjukan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses yang mencakup dua hal, antaranya : a) peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi maksud peneliti, peran berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat. b) peran adalah sesuatu yang dilakukan yang dilakukan dalam masyarakat.

Di Indonesia peran Abdurahman Wahid cukup fenomenal pada zamannya dan cukup kontroversial, baik pemikiran, tindakan, maupun ucapannya dalam mendimanisir kehidupan Agama, Sosial, Politik dan Budaya pada aras lokal, nasional, maupun internasional. Abdurahman Wahid sering disebut *Ice Breaker* (Pemecah es) karena kemampuannya memecah ruang baku, bahkan ruang sacral sekalipun, ibarat air tenang yang sedang mengalir dalam satu sistem (kemapanan) mampu di obok-oboknya, Abdurahman Wahid juga sering disebut tokoh yang sering melakukan *Counter Culture* (anti kemapanan, *tase case* (uji kasus), maupun menguji fenomena dengan metode *Trial dan Eror* melalui lontaran-lontaranya sebagai proses pembelajaran bagi bangsa yang majemuk (Pluralis) ini.¹

¹ Greg Barton, *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurahman Wahid*, h. 8.

Abdurahman Wahid memulai manuver politik pada tahun 1984. Abdurahman Wahid secara aklamasi oleh sebuah tim *ahlul ahli wal 'aqdi*, yang diketuai K. H. As 'ad Syamsul Arifin, untuk menduduki jabatan ketua umum PBNU dalam muktamar ke 27 NU di Pondok Pesantren, Salafiyah, Sukorejo Situbondo.² Kehadiran Abdurahman Wahid di dunia politik dengan semua gagasan-gagasan cemerlangnya ternyata dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, sekaligus menjadikan tokoh alternatif dalam suksesi kepemimpinan nasional pada Sidang Umum MPR RI 1999 untuk memimpin bangsa ini dengan legitimasi yang sangat kuat. Sebab, pemerintahannya adalah hasil Pemilu 1999 yang terbilang relatif Demokratis, dibanding dengan pemilu sebelumnya.³

Perjalanan Politik dan kehidupan Abdurahman Wahid yang nyeleneh dan penuh kontroversial, menjadikan istilah nyeleneh dan kontroversial akhirnya menjadi pelindung yang kokoh bagi Abdurahman Wahid untuk menjalankan ide-idenya. Akan tetapi layaknya hukum besi sejarah, sesuatu yang nyeleneh selalu tidak bertahan lama (bertahta), kecuali nilai-nilainya yang terus memberi energi, inspirasi, motivasi, inovasi dan dinamisasi. Bagi kita merangkai eksistensi Abdurahman Wahid menerbitkan tantangan tersendiri, bahwa mungkin bagi siapapun dan dimanapun, untuk bangkit dan berdiri seraya melakukan perubahan (mulai dari diri) untuk

² Faisal Ismail, *Dilema NU Di Tengah Badai Pragmatisme Politik* (Jakarta : Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004), h. 11.

³ Anas Urbaningrum, *Melamar Demokrasi : Dinamika Politik Indonesia* (Jakarta :Republika, 2004), h.102

masyarakat, bangsa dan dunia, yang memiliki arti penting bagi nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian dan kemajuan.⁴

Sikap politik Abdurahman Wahid yang lentur menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang selalu diperhitungkan oleh siapapun. Dia tidak punya alergi untuk bertemu dengan banyak orang, mendengar dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk orang atau kekuatan politik yang pernah bersebrangan dengannya.⁵ Gaya komunikasi politik Abdurahman Wahid memang unik dan berbeda dengan kebanyakan tokoh politik di Indonesia. Dia seringkali membuka dikursus di media massa tentang banyak hal, termasuk masalah yang bagi sebagian orang anggap isu sensitif. Menkritik dan bersikap oposan terhadap orang dan kelompok tertentu yang dianggap menyeleweng seolah menjadi *trade mark (simbol)* diri Abdurahman wahid.

6

Sebagai tokoh pluralis, Abdurahman Wahid selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi kultural warga Negara Indonesia, sekecil apapun kelompok yang ada. Kebebasan akan keyakinan dan kepercayaan kultural merupakan hak asasi yang harus dilindungi. Bukan hanya untuk kepentingan politik dan kekuasaan, atau menjabat sebagai presiden saja. Ketika sebelum dan sesudah tidak menjabat presiden, Abdurahman Wahid selalu menunjukkan praktik hidupnya sehari-hari.

⁴ Abdurahman Nusantara, *Ummat Menggugat Gus Dur, Menelusuri Jejak Penentang Syariat*, (Bekasi-Jawa Barat: Aliansi Pecinta Syariat, 2006), h. 1.

⁵ Faisal Ismail, *Dilema NU Di Tengah Badai Pragmatisme Politik*, h.152

⁶ *Ibid*, h.153

Banyak persoalan yang menarik untuk dicermati dari gaya kepresidenan Abdurahman Wahid yang unik, sulit dicerna sekaligus menimbulkan salah paham. Namun keunikan gaya kepresidenan Abdurahman Wahid menjadi petaka bagi kepemimpinannya. Ia diturunkan dari jabatannya sebagai presiden tanggal 24 Juli 2001. Hal ini menarik untuk diteliti, maka penulis memberikan judul “Peran Abdurahman Wahid dalam Politik di Indonesia (1999-2001)”.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

a) Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Abdurahman Wahid dalam politik di Indonesia (1999-2001)?
2. Ide-ide sosial politik seperti apa yang menjadikan Abdurahman Wahid sebagai *Political Man* di Indonesia ?

b) Batasan Masalah

Agar ruang lingkup masalah tidak menyimpang, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

- a. Penulis membatasi penelitian pada Peran Abdurahman Wahid dalam Politik di Indonesia hanya pada Periode 1999 hingga 2001 saja.
- b. Penulis membatasi penelitian tentang pemikiran-pemikiran sosial politik Abdurahman Wahid di Indonesia.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peran Abdurahman Wahid dalam dunia politik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pemikiran-pemikiran Abdurahman Wahid serta interaksi sosial politik yang dimainkannya.

Setelah dijelaskan tujuan dari penelitian di atas, penelitian ini dapat memberi manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumber yang menambahi literatur dalam penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang perpolitikan di Indonesia.
3. Secara akademis, merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Humaniora pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Jurusan Ilmu Politik Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut Syamsudin Haris dalam bukunya *“PPP Dan Politik Orde Baru*. Menjelaskan upaya politik yang dilakukan pemerintah Orde Baru pada awal kelahirannya menjadi faktor pendorong utama pembentukan partai. Dari gerakan kultural menjadi gerakan struktural, dalam rangka mengembangkan ide, gagasan dan

pikiran-pikirannya yang "nyeleneh" mulai dari demokrasi, keadilan, keterbukaan, kejujuran, pemerintahan yang bersih (*clean government*), sampai dengan demiliterisasi, deformalisasi (Islam dan tradisi), pluralisme dan universalisme.⁷

Menurut Faisal Ismail dalam bukunya “*Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik*”, 2004. Menjelaskan bahwa perjalanan Aburahman Wahid dalam proses penegakkan demokratisasi di Indonesia sangat panjang dan beliku. Sosok Abdurahman Wahid memang fenomenal baik dalam khazanah intelektual, perjalanan politik di Indonesia kontemporer maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Dia adalah tokoh kharismatik yang memiliki basis massa nyata dari kalangan NU. Di negeri Indonesia demokrasi belum lagi tegak dengan kokoh masih lebih berupa hiasan luar berupa kosmetik dari pada sikap yang melandasi pengaturan hidup yang sesungguhnya.⁸

Menurut Syamsul Bakri dan Mudhofir dalam bukunya “*Jombang Kairo, Jombang Chicago: Sintesis Pemikiran Gus Dur dan Cak Nur dalam Pembaharuan Islam di Indonesia*, 2004. Menjelaskan bahwa pemikiran kedua tokoh besar Indonesia ini, berarti harus pula menelaah pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan umat Islam dewasa ini. Mereka bukan saja inklusif dalam persoalan-persoalan keagamaan, tetapi inklusif dalam pengertian politik.⁹

⁷ Syamsudin Haris, *PPP Dan Politik Orde Baru*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 1991)h. 34

⁸ Faisal Ismail, *Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik*, h. 189

⁹ Syamsul Bakri dan Mudhofir, *Jombang Kairo, Jombang Chicago: Sintesis Pemikiran Gus Dur dan Cak Nur dalam Pembaharuan Islam di Indonesia*, (Solo: Tiga Serangkai, 2004),h. 138-139.

Menurut Arief Affandi dalam bukunya yang berjudul *Islam Demokrasi Atas Bawah Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur Dan Amien Rais*, 1997. Menjelaskan bahwa demokrasi harus melewati beberapa langkah: pertama, pendidikan politik pada massa rakyat. Dengan pendidikan ini diharapkan mereka memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat. Kedua, penguasa harus diyakinkan bahwa hanya mereka memiliki legitimasi atau keabsahan yang kuat kalau memang benar-benar didukung oleh rakyat, bukan karena ketakutan atau tekanan, tetapi karena kepercayaan. Ketiga, kaum intelektual mempunyai peranan yang besar didalam memasyarakatkan gagasan-gagasan demokrasi.¹⁰

Di dalam bukunya Achmad Patoni yang berjudul *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, 2007. Menjelaskan tentang : *pertama*, peran kiai pesantren adalah membimbing dan menjadi panutan santri. Disamping peran pokok membina pesantren terdapat fenomena kiai terjun pada partai politik. *Kedua*, motif partisipasi kiai pesantren dalam partai politik didasari oleh alasan untuk memperjuangkan Islam melalui jalur struktural sekaligus didasari atas moralitas politik yang wajib diperjuangkan. *Ketiga*, aktivitas politik dalam pandangan kiai adalah untuk memperjuangkan kepentingan umat melalui kekuasaan.¹¹

Menurut Nur Aini mahasiswa Fakultas Adab Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Konsetrasi Ilmu Politik Angkatan 2008, dalam skripsinya yang berjudul "*PPP dan*

¹⁰ Arief Affandi, *Islam Demokrasi Atas Bawah Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur Dan Amien Rais*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, Cet 3, 1997), h. 123

¹¹ Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2007), h. 185

Pembangunan Politik Masyarakat Madani Era Pemerintahan Soeharto (1973-1980), menjelaskan bahwa PPP berperan aktif dalam mensosialisasikan kebijakan politik Orde Baru terhadap perkembangan masyarakat madani yaitu dengan menciptakan (free public sphere) dimana warga masyarakat secara bebas mengeluarkan aspirasinya.¹²

Beberapa kajian tentang “Nahdlatul Ulama (NU) dan Politik: Sebuah Telaah Terhadap Gerakan Politik NU di Era Reformasi” yang ditulis oleh Zainal Agus Sugiarto, mahasiswa UIN Jakarta, tahun 2002/2003. Disini Ia hanya membahas secara umum bagaimana NU sebagai organisasi besar Islam kembali dikancah perpolitikan nasional pasca runtuhnya Orde Baru (Reformasi) dengan melihat PKB sebagai jalan tengah politik NU dan Abdurrahman Wahid dipandang sebagai bagian terkecil dari sub pembahasan.¹³

Ridjaluddin.F.N, “*Demokrasi Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Keterpaduannya dengan Demokrasi Amien Rais dan Syafi’i Ma’arif*”, Skripsi.¹⁴ penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pandangan Abdurrahman Wahid, tentang Demokrasi adalah suatu proses, yang artinya Demokrasi tidak dipandang sebagai suatu sistem yang pernah selesai dan sempurna. Demokrasi sebagai proses mengandung makna bahwa kadar pelaksanaan konkrit dari prinsip itulah yang jadi ukuran penting. Hal diatas sangat berkaitan erat dalam membangun Demokrasi di

¹² Nur Aini, *PPP Dan Pembangunan Politik Masyarakat Madani Era Pemerintahan Soeharto (1973-1980)*, Skripsi Fakultas Adab, (Perpustakaan Universitas Islam Negeri Rafah Palembang, 2008), h. 12

¹³ Zainal Agus Sugiarto, *Ulama (NU) dan Politik: Sebuah Telaah Terhadap Gerakan Politik NU di Era Reformasi*, Skripsi, (Jakarta :2003). h.1-3

¹⁴ Ridjaluddin, *Demokrasi Pemikiran Gus Dur dan Keterpaduannya Dengan Demokrasi Amien Rais Dan Syafi’ Ma’arif*, Skripsi, (Jakarta: 2004). h. 1-5.

Indonesia dan peran yang diimplikasikan oleh Abdurahman Wahid sebagai presiden, sebagai kontribusinya dalam melaksanakan sesuai pemikirannya.

Di dalam Jurnal Hendro Sumartono berjudul *Dinamika Politik Rezim Orde Baru di Indonesia; Studi Tentang Kegagalan Konsolidasi Politik Rezim Orde Baru Pada Tahun 1990-1996*. Pada kesimpulannya dia menulis figur Megawati sangat populis sosoknya yang diidentikkan dengan antan presiden Sukarno membuat gerakan massa dan aktivis pro-demokrasi memiliki kekuatan tersendiri. Soeharto bersama sekutunya ternyata tidak mampu untuk mengakomodasi perkembangan situasi politik yang baru ini. Oleh karena itu Soeharto dan militer tetap menggunakan satu-satunya metode yang dulu mereka anggap tepat dalam proses konsolidasinya, yaitu penindasan dan kekerasan.¹⁵

Berbeda dengan kajian diatas, disini penulis mencoba melihat peran Abdurahman Wahid dalam politik di Indonesia (1999-2001) secara spesifik dan fokus. Oleh sebab itu, Ia menolak jika peran yang harus dimainkan dari idealisasi Agama sebagai alternatif satu-satunya pilihan bagi usaha demokratisasi. Abdurrahman Wahid sangat mengkhawatirkan jika agama Islam sebagai satu-satunya alternatif, justru akan kehilangan relevansinya. Demokratisasi harus dimulai dari pemberdayaan politik rakyat. Dalam proses ini semua unsur masyarakat harus dilibatkan tanpa mengenal golongan manapun. Yang terpenting masyarakat harus memulai untuk berdemokrasi sebagai hakekat dari sebuah demokratisasi. Begitu juga tentang peran Abdurrahman

¹⁵ Jurnal Hendro Sumartono, *Dinamika Politik Rezim Orde Baru di Indonesia; Studi Tentang Kegagalan Konsolidasi Politik Rezim Orde Baru Pada Tahun 1990-1996*.

Wahid dalam politik di Indonesia (1999-2001) yang kemudian menjadi suatu hal yang menarik bagi penulis untuk menelitinya.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian tentang tokoh. Adapun tokoh yang teliti adalah Abdurahman Wahid. Menurut Hugo. F. Reading peran adalah bagian yang dimainkan seseorang.¹⁶

Menurut Wahjosumidjo peranan utama seseorang pemimpin ialah mengajak atau meyakinkan atau pengikut sedemikian rupa, agar mereka mau memberikan kontribusi untuk mencapai suatu tujuan dengan kemampuan maksimal mereka. Seorang pemimpin merupakan orang yang dikagumi oleh orang lain atau bawahan sehingga ada kecenderungan apa yang dilakukan dan dimiliki untuk ditiru.¹⁷

Dalam penelitian ini peranan Abdurahman wahid dalam politik di Indonesia (1999-2001) diasumsikan memiliki kedudukan dan peranan yang penting untuk memperoleh dan mempengaruhi kekuasaan. Berdasarkan penjelasan diatas sebagai alat analisis untuk menggarap penulisan peran Abdurahman Wahid dalam politik di Indonesia (1999-2001). Di samping itu, perlu diberi catatan bahwa penggunaan teori lainnya yang dianggap relevan untuk membahas masalah pada bab-bab selanjutnya.

Kepemimpinan pada umumnya berusaha untuk memberikan penjelasan dan interpretasi mengenai pemimpin dan kepemimpinan dengan mengemukakan beberapa

¹⁶ Hugo. F. Reading, *Kamus-Kamus Ilmu Sosial*, (Jakarta :Raja Wali Press, 1986), h, 468.

¹⁷ Wahdjosumidjo, *Kiat Kepemimpinan Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : PT. Harapan Masa PGRI, 1994), h, 20.

segi antara lain: a) Seseorang ditakdirkan lahir untuk menjadi pemimpin. Seseorang menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. b) Seseorang menjadi pemimpin bila sejak lahiria memiliki bakat kepemimpinan kemudian dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman serta sesuai dengan tuntutan lingkungan. Untuk mengenai persyaratan kepemimpinan selalu dikaitkan dengan kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan.

Teori-teori dalam Kepemimpinan yaitu: a) Teori Sifat, teori ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai atau ciri-ciri yang dimiliki pemimpin itu. Atas dasar pemikiran tersebut timbul anggapan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil, sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Dan kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualitas seseorang dengan berbagai sifat, perangai atau ciri-ciri di dalamnya. b) Teori Perilaku, dasar pemikiran teori ini adalah kepemimpinan merupakan perilaku seorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok kearah pencapaian tujuan. Maka dapat dipahami bahwa pemimpin itu mempunyai sifat kebiasaan, watak dan kepribadian sendiri yang khas. Sehingga tingkah laku dan gayalah yang membedakan dirinya dengan orang lain. Gaya akan selalu mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya ¹⁸

Abdurahman Wahid memiliki wacana *religio-kultural* yang dalam dan kuat dalam banyak hal yang tidak tampak (intangible) tetapi mendasari semua tindakannya dalam mengimplementasikan peran-perannya (tangible). Hal ini disebabkan Abdurahman

¹⁸ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 20.

Wahid menguasai nilai-nilai agama dan budaya lokal, filosofis dan dasar-dasar ideologis. Pemanfaatan terhadap dasar-dasar ideologis atau (ideologically based) dan sistem keyakinan yang memicu secara positif (positive belief system) dapat memunculkan dukungan masyarakat dan terelemenasinya konflik budaya dan keagamaan. Disamping itu, Abdurahman Wahid juga memiliki kharisma/daya tarik yang luar biasa sehingga mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar. Yang menarik, para pengikut Abdurahman Wahid kadang tidak mempersoalkan nilai-nilai yang dianut, sikap dan perilaku serta gaya Abdurahman Wahid. Bisa saja kharismatik Abdurahman Wahid ini menggunakan gaya yang otokratik atau diktatorial, namun para pengikutnya tetap setia kepadanya.

Disamping itu penulis juga menggunakan Ideologi Politik (*Political Ideology*) yang menghimpun Nilai-nilai, Ide-ide, Norma-norma, kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau kelompok orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapi dan yang menentukan tingkah laku politik. Dasar dari ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola tertip sosial politik yang ideal. Ideologi politik mencakup pembahasan dan diagnose, serta saran-saran (*Prescription*) mengenai bagaimana capaian tujuan ideal itu.¹⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang memberikan gambaran tentang Peran Abdurrahman Wahid dalam Politik di Indonesia (1999-2001). Metodologi Deskriptif

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 32

lebih memusatkan perhatian pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya, dan data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dengan analisa, kemudian menjelaskan prosedur pengumpulan data, serta pengawasan dan penilaian pada fakta tersebut.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dibutuhkan dalam studi tokoh adalah kualitatif, akan tetapi metodologinya berbeda dengan penelitian-penelitian bidang sosial lainnya. Menurut Arief Furdian dan Agus Maimun dalam bukunya “Studi Tokoh: Metode Penelitian mengenai tokoh” melalui metode kualitatif, penulis dapat mengenal sang tokoh secara pribadi dan melihat dia mengembangkan definisinya sendiri tentang dunia dengan berbagai pemikiran, karya dan perilaku yang dijalaninya.

Penelitian ini bersinggungan dengan wacana keamanan kontemporer dan objek wacana penelitiannya adalah pemikiran seorang tokoh yang kontroversial. Penelitian studi tokoh, seperti yang dikatakan oleh Arief Furdan dan Agus Maimun, dikategorikan kedalam jenis penelitian kualitatif.²⁰

Menelusuri pemikiran melalui karya-karyanya, peristiwa yang melatar belakangi lahirnya karya-karya tersebut dan pengaruh dari karya yang

²⁰ Lihat Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh, Metode Penelitian Tokoh*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2005, h. 16

dihasilkan. Data kualitatif terdiri dari kutipan-kutipan orang dan deskripsi keadaan, kejadian interaksi dan kegiatan. Dengan menggunakan jenis data kualitatif, memungkinkan peneliti mendekati data sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual dan kategoris dari 2 data itu sendiri.²¹

b. Sumber Data

Ada dua sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang berkaitan dengan pemikiran Abdurrahman Wahid adalah karya-karya yang ia tuliskan sendiri. Kesimpulan data primer adalah data asli dari seorang tokoh, dan untuk data sekunder berasal dari teoritis sosial lainnya yang pernah mengintervensi pemikiran Abdurrahman Wahid dalam lingkup Islam dan politik.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode, dan untuk memperoleh data yang ada relevansinya dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mendapatkan data yang akurat tentang Peran Abdurrahman Wahid dalam Politik di Indonesia (1999-2001), adalah dengan membaca dan menelaah buku-buku sumber yang terkait dengan penelitian penulis.

²¹ Lihat Bruce A. Chodwick, *Social Science Research Methods*, terj. Sulistia (dkk), *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Semarang: IKP Semarang Press, 1991), h. 234

d. Teknik Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian pemikiran tokoh disini mempergunakan analisa sejarah. Menurut Tolfen, ada dua unsur pokok yang dihasilkan oleh analisa sejarah. Pertama, kegunaan dari konsep periodisasi atau denvasi. Kedua, rekonstruksi proses genesis, perubahan dan perkembangan. Melalui analisa sejarah baru dapat dilacak asal mula situasi yang melahirkan suatu ide dari seorang tokoh.

Melalui analisa sejarah pula, dapat diketahui bahwa seorang tokoh dalam berbuat atau berpikir sesungguhnya dipaksa oleh keinginan-keinginan dan tekanan yang muncul dari dirinya sendiri. Kita dapat melihat tindakan-tindakannya secara mendalam dipengaruhi tidak Cuma oleh dorongan internal yang berupa ide, keyakinan, konsepsi-konsepsi awal yang tertanam dalam dirinya, tetapi juga oleh keadaan eksternal.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah, yang terdiri dari empat bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, membahas tentang biografi Abdurahman Wahid dan latar belakang pemikirannya, latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, perjalanan karir, riwayat pemikiran, nahdlatul ulama, karya-karya intelektual K. H. Abdurahman Wahid.

Bab *ketiga*, yaitu Abdurahman Wahid dalam politik di Indonesia (1999-2001), membahas tentang pemerintahan Abdurahman Wahid beserta kebijakan-kebijakannya bidang politik, ekonomi, militer, hukum, budaya dan sosial.

Bab *keempat*, penutup dan dari uraian skripsi yang meliputi kesimpulan dari penelitian yang telah penulis selesaikan dan saran bersifat membangun.

BAB II

BIOGRAFI ABDURRAHMAN WAHID DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRANNYA

A. Latar Belakang Keluarga

Abdurahman “*Addakhil*”, demikian nama lengkapnya. Secara leksikal, “*Addakhil*” berarti “Sang Penakluk”. sebuah nama yang diambil Wahid Hasyim, orang tuanya, dari seorang perintis Dinasti Umayyah yang telah menancapkan tonggak kejayaan Islam di Spanyol. Belakangan kata “*Addakhil*” tidak cukup dikenal dan diganti nama “Wahid”, Abdurahman Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. *Gus* adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau masa.²²

Abdurahman Wahid adalah putra pertama dari enam bersaudara yang dilahirkan di denanyar Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Secara genetik Abdurahman Wahid adalah keturunan *darah biru*. Ayahnya, K. H. Wahid Hasyim adalah putra K. H. Hasyim Asy’ ari, pendiri jam’iyah Nahdatul Ulama (NU) organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dan pendiri Pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibundanya, Hj. Sholehah adalah putri pendiri pesantren Denanyar Jombang, K. H. Bisri Syansuri. Kakek dari pihak ibunya ini juga merupakan tokoh

²² Syamsul Bakri, *Jombang Kairo, Jombang Chicago*. (Solo: Tiga Serangkai. 2004), h. 24.

NU yang menjadi Rais ‘Aam PBNU setelah K. H. Abdul Wahab Hasbullah. Dengan demikian, Abdurahman Wahid merupakan cucu dari dua ulama NU sekaligus dan dua tokoh besar di Indonesia.²³

Pada tahun 1949, ketika *clash* dengan pemerintahan Belanda telah berakhir, ayahnya diangkat sebagai Menteri Agama Pertama, sehingga Keluarga Wahid Hasyim pindah ke Jakarta. Dengan demikian suasana baru telah dumsukinya, tamu-tamu yang terdiri dari para tokoh dengan berbagai bidang profesi yang sebelumnya telah dijumpai di rumah kakeknya terus berlanjut ketika ayahnya menjadi Menteri Agama. Hal itu memberikan pengalaman tersendiri bagi seorang anak bernama Abdurahman Wahid. Secara tidak langsung Abdurahman Wahid mulai berkenalan dengan dunia politik yang didengar dari kolega ayahnya yang sering “berkumpul” di rumahnya.

Sejak masa kanak-kanak ibunya telah ditandai berbagai isyarat bahwa Abdurahman Wahid akan mengalami garis hidup yang berbeda dan memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab terhadap NU. Pada bulan April 1953, Abdurahman Wahid pergi bersama ayahnya mengendarai mobil ke daerah Jawa Barat untuk meresmikan madrasah baru. Di suatu tempat di sepanjang pegunungan antara Cimahi dan Bandung, mobilnya mengalami kecelakaan.²⁴ Abdurahman Wahid bisa diselamatkan akan tetapi ayahnya meninggal. Kematian ayahnya membawa pengaruh tersendiri dalam kehidupannya.

²³ Abdul Halim, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Gagasan Abdurrahman Wahid*, (Jakarta : Rajawali pres, 1999), h. 32

²⁴ Abdul Karim, *NU Menyongsong Tahun 2000*, (Kendal : CV Noer Chamid:1989), h. 45-47

Dalam kesehariannya, Abdurahman Wahid mempunyai kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya, juga aktif berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Pada usia belasan tahun, Abdurrahman Wahid telah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel, dan buku-buku secara serius. Karya-karya yang dibaca oleh Abdurrahman Wahid tidak hanya cerita-cerita, seperti cerita silat dan fiksi tetapi wacana sosial-politik, filsafat, dan dokumen-dokumen manca negara juga tidak luput dari perhatian ketika di sekolah tingkat dasar Abdurrahman Wahid pernah memenangkan lomba karya tulis dan mendapat penghargaan dari pemerintah.

Di samping membaca, Abdurahman Wahid senang bermain bola, catur, dan musik. Abdurrahman Wahid pernah diminta untuk menjadi komentator sepak bola. Kegemaran lainnya yang juga melengkapi hobinya adalah menonton film, khususnya film-film Prancis. Kegemarannya ini membuat dia memiliki apresiasi yang mendalam terhadap dunia film. Inilah mengapa pada tahun 1986-1987 Abdurrahman Wahid diangkat sebagai Ketua Juri Festival Film Indonesia.²⁵

Masa remaja Abdurahman Wahid sebagian besar dihabiskan di Yogyakarta dan Tegalrejo (Magelang). Di dua tempat inilah pengembangan ilmu pengetahuan mulai meningkat. Masa berikutnya, Abdurahman Wahid tinggal di Jombang, di pesantren Tambak Beras sampai kemudian melanjutkan studinya di mesir. Sebelum berangkat

²⁵ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh, Metode Penelitian Tokoh*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2005), h. 16

ke mesir, pamannya telah melamarkan seorang gadis untuknya yaitu Sinta Nuriyah anak H. M. Sakur perkawinannya dilaksanakan ketika Ia berada di Mesir.

B. Riwayat Pendidikan

Pertama kalinya belajar, Abdurahman Wahid kecil belajar pada sang kakek K. H. Hasyim Asy'ari. Saat serumah dengan kakeknya, ia diajari mengaji dan membaca al-Qur'an. Dalam usia lima tahun ia telah lancar membaca al-Qur'an. Pada saat sang ayah pindah ke Jakarta, disamping belajar formal di sekolah Abdurahman Wahid masuk juga mengikuti les privat Bahasa Belanda. Guru lesnya bernama Willem Buhl, seorang Jerman yang telah masuk Islam, yang mengganti namanya dengan Iskandar.²⁶

Untuk menambah pelajaran Bahasa Belanda tersebut, Buhl selalu menyajikan musik klasik yang biasa dinikmati oleh orang dewasa. Inilah pertama kali persentuhan Abdurahman Wahid dengan dunia Barat dan dari sini pula Abdurahman Wahid mulai tertarik dan mencintai musik klasik. Menjelang kelulusannya di Sekolah Dasar, Abdurrahman Wahid memenangkan lomba karya tulis (mengarang) se-wilayah kota Jakarta dan menerima hadiah dari pemerintah. Pengalaman ini menjelaskan bahwa Abdurrahman Wahid telah mampu menuangkan gagasan /ide-idenya dalam sebuah

²⁶ Greg Barton, *Biografi Abdurahman Wahid, The Authorized Biography Of Abdurahman Wahid*, (Yogyakarta : LKiS, 2002), h. 24

tulisan.²⁷ Karenanya wajar jika pada masa kemudian tulisan-tulisan Abdurrahman Wahid menghiasi berbagai media massa.

Setelah lulus dari Sekolah Dasar, Abdurrahman Wahid dikirim orang tuanya untuk belajar di Yogyakarta. Pada tahun 1953 ia masuk SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) Gowongan sambil mondok di pesantren Krapyak. Sekolah ini meskipun dikelola oleh Gereja Katolik Roma akan tetapi sepenuhnya menggunakan kurikulum sekuler. Di sekolah ini pula pertama kali Abdurrahman Wahid belajar Bahasa Inggris. Karena merasa terkekang hidup dalam dunia pesantren, akhirnya ia minta pindah ke kota dan tinggal di rumah H. Junaidi seorang pimpinan lokal muhammadiyah dan orang yang berpengaruh di SMEP. Kegiatan rutinnnya, setelah shalat subuh mengaji pada K. H. Maksum Krapyak, siang hari sekolah di SMEP, dan pada malam hari ia ikut berdiskusi bersama dengan H. Junaidi dan anggota Muhammadiyah lainnya.²⁸

Ketika menjadi siswa sekolah lanjut pertama tersebut, hobi membacanya semakin mendapatkan tempat. Abdurrahman Wahid, misalnya didorong oleh gurunya untuk menguasai Bahasa Inggris, sehingga dalam waktu satu-dua tahun Abdurrahman Wahid menghabiskan beberapa buku dalam Bahasa Inggris diantara buku-buku yang pernah dibacanya adalah karya Ernest Hemingway, John Steinbach, dan William Faulkner. Di samping itu ia juga membaca sampai tuntas beberapa karya Johan Huizinga, Andre Malraux, Ortega Y. Gasset, dan beberapa karya penulis Rusia,

²⁷ Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, (Grasindo: Jakarta, 1997), h. 17-18

²⁸ Alfian, *Pemikiran Politik dan Perubahan Politik Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1983), h. 245.

seperti Pushkin, Tolstoy, Dostoevsky, dan Mikhail Sholokov. Abdurahman Wahid juga melahap habis beberapa karya Will Durant yang berjudul *The Strory of Civilazation*.

Selain belajar dengan membaca buku-buku berbahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggrisnya sekaligus untuk menggali informasi, Abdurahman Wahid aktif mendengarkan siaran lewat radio Voice of America dan BBC London. Ketika mengetahui bahwa Abdurahman Wahid pandai dalam bahasa Inggris, Sumatri seorang guru SMEP yang juga anggota Partai Komunis member buku karya Lenin 'What is To Be Done'. Pada saat yang sama, anak yang memasuki masa remaja ini telah mengenal Das Kapital-nyaq Karl Marx, Filsafat Plato, dan sebagainya. Dari paparan ini tergambar dengan jelas kekayaan informasi dan keluasan wawasan Abdurahman Wahid.²⁹

Selulusnya dari SMEP Abdurahman Wahid melanjutkan belajarnya di pesantren Tegarejo Magelang Jawa Tengah. Pesantren ini diasuh oleh K. H. Chudhari. Kyai Chudhari inilah yang memperkenalkan Abdurahman Wahid dengan ritus-ritus sufi dan menanamkan praktek-praktek ritual mistik. Di bawah bimbingan kyai, Abdurrahman Wahid menziarahi kuburan keramat para wali di Jawa. Pada saat masuk ke pesantren ini, Abdurahman Wahid membawa seluruh koleksi buku-bukunya yang membuat santri-santri lain terheran. Pada saat ini pula Abdurahman Wahid telah mampu menunjukkan kemampuannya dalam berhumor dan berbicara. Dalam kaitan dengan yang terakhir ini ada sebuah kisah menarik yang patut diungkap

²⁹ *Ibid*, h. 246-248

dalam paparan ini adalah pada acara imtihan pesta akbar yang diselenggarakan sebelum puasa pada saat perpisahan santri yang selesai menamatkan belajar dengan menyediakan makanan dan minuman, mendatangkan semua hiburan rakyat, seperti gamelan, tarian tradisional, kuda lumping, dan sebagainya.

Setelah menghabiskan dua tahun di pesantren Tegalrejo, Abdurrahman Wahid pindah kembali ke Jombang dan tinggal dipesantren Tambak Beras. Saat itu usianya mendekati 20 tahun sehingga dipesantren milik pamannya KH. Abdul Fatah ia menjadi seorang ustadz dan menjadi ketua keamanan. Pada usia 22 tahun, Abdurrahman Wahid berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji yang kemudian diteruskan ke Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas al-Azhar. Pertama kali sampai di Mesir ia merasa kecewa karena tidak dapat langsung masuk dalam Universitas al-Azhar, akan tetapi harus masuk Aliyah (semacam sekolah persiapan). Untuk menghilangkan kebosanan Abdurrahman Wahid mengunjungi perpustakaan dan pusat layanan informasi Amerika (USIS) dan tokoh-tokoh buku dimana ia dapat memperoleh buku-buku yang dikehendaki.³⁰

Terdapat kondisi yang menguntungkan saat Abdurrahman Wahid berada di Mesir, di bawah pemerintahan presiden Gamal Abdul Nasr seorang nasionalis yang dinamis, kairo menjadi era keemasan kaum intelektual. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat mendapat perlindungan yang cukup. Pada tahun 1966 Abdurrahman Wahid pindah ke Irak, sebuah Negara modern yang memiliki peradaban Islam yang cukup maju. Di Irak ia masuk dalam *Departement of Religion* di Universitas Baghdad

³⁰ Syamsul Bakri, *Jombang Kairo, Jombang Chicago*, h. 27.

sampai tahun 1970. Selama di Baghdad Abdurahman Wahid mempunyai pengalaman hidup yang berbeda dengan di Mesir. Di kota seribu satu malam ini Abdurrahman Wahid mendapatkan rangsangan intelektual yang tidak didapatkan di Mesir. Pada waktu yang sama ia kembali bersentuhan dengan buku-buku besar karya sarjana orientalis Barat. Ia kembali menekuni hobinya secara intensif dengan membaca hampir semua buku yang ada di Universitas. Di luar dunia kampus, Abdurahman Wahid rajin mengunjungi makam-makam keramat para wali, termasuk makam Syekh Abdul Qadir al-Jailani, pendiri jama'ah tarekat Qadariyah. Ia juga menggeluti ajaran imam junaid al-Baghdadi, seorang pendiri aliran tasawuf yang diikuti oleh jama'ah NU. Disinilah Abdurahman Wahid menemukan sumber spiritualitasnya.³¹

Kondisi politik yang terjadi di Irak ikut mempengaruhi perkembangan pemikiran politik Abdurahman Wahid pada saat itu. Kekagumannya pada kekuatan nasionalisme Arab, khususnya kepada Saddam Husain sebagai salah satu tokohnya menjadi luntur ketika Syekh yang dikenalnya, Aziz Badri tewas terbunuh. Selepas belajar di Baghdad Abdurahman Wahid bermaksud melanjutkan studinya ke Eropa.³²

Akan tetapi persyaratan yang ketat, utamanya dalam bahasa misalnya untuk masuk dalam kajian klasik di kohl n harus menguasai bahasa Hebrew yunani atau latin dengan baik di samping bahasa jerman tidak dapat dipenuhinya akhirnya yang dilakukan adalah melakukan kunjungan dan menjadi pelajar keliling dari satu

³¹ Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Nabi: Selayang Pandang Sejarah Para Ulama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), h. 67

³² Gus Yusuf dan A. Suaedy, *Pesantren Harus Menjadi Bagian Bagian Proses Demokrasi*, (Jakarta : PT Grafindo, 2007, h. 4-5.

universitas ke universitas lainnya. Pada akhirnya ia menetap di Belanda selama enam bulan dan mendirikan perkumpulan pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia yang tinggal di Eropa untuk biaya hidup di rantau, dua kali sebulan ia pergi ke pelabuhan untuk bekerja sebagai pembersih kapal tanker. Abdurahman Wahid juga sempat pergi ke Mc GILL University di Kanada untuk mempelajari kajian-kajian keislaman secara mendalam. Namun, akhirnya ia kembali ke Indonesia setelah terilhami berita-berita yang menarik sekitar perkembangan dunia pesantren. Perjalanan keliling studi Abdurahman Wahid berakhir pada tahun 1971, ketika ia kembali ke Jawa dan mulai memasuki kehidupan barunya, yang sekaligus sebagai perjalanan awal karirnya.

Meski demikian, semangat belajar Abdurrahman Wahid tidak surut. Buktinya pada tahun 1979 Abdurahman Wahid ditawarkan untuk belajar di sebuah universitas Australia guna mendapat gelar doktor. Akan tetapi maksud yang baik itu tidak dapat dipenuhi sebab semua promotor tidak sanggup dan menganggap bahwa Abdurahman Wahid tidak membutuhkan gelar tersebut. Memang dalam kenyataannya beberapa disertasi calon doktor dari Australia justru dikirimkan kepada Abdurahman Wahid untuk dikoreksi, dibimbing yang kemudian dipertahankan dihadapan sidang akademik.

C. Perjalanan Karir

Sepulang dari pengembaraannya mencari ilmu, Abdurrahman Wahid kembali ke Jombang dan memilih menjadi guru. Pada tahun 1971, tokoh muda ini bergabung di Fakultas Usuludin Universitas Tebu Ireng, dan pada tahun yang sama Abdurrahman Wahid mulai menjadi penulis. Ia kembali menekuni bakatnya sebagai penulis dan

kolumnis. Melalui tulisan-tulisan tersebut gagasan pemikiran Abdurrahman Wahid mulai mendapat perhatian banyak. Djohan Efendi seorang intelektual terkemuka pada masanya, menilai bahwa Abdurrahman Wahid adalah seorang pencerna. Abdurrahman Wahid mencerna semua pemikiran yang dibacanya kemudian diserap menjadi pemikirannya sendiri. Sehingga tidak heran jika tulisan-tulisannya jarang menggunakan foot note. Pada tahun 1974 Abdurrahman Wahid diminta pamannya, KH. Yusuf Hasyim untuk membantu di pesantren Tebu Ireng Jombang dengan menjadi sekretaris. Dari sini Abdurrahman Wahid mulai sering mendapatkan undangan menjadi nara sumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan baik di dalam maupun di luar negeri.³³

Selanjutnya Abdurrahman Wahid terlibat dalam kegiatan LSM. Pertama di LP3ES bersama Dawan Rahardjo Aswab Mahasin dan Adi sasono dalam proyek pengembangan pesantren, kemudian Abdurrahman Wahid mendirikan P3M yang dimotori oleh LP3ES. Pada tahun 1979 Abdurrahman Wahid pindah ke Jakarta. Mula-mula ia merintis pesantren Ciganjur, sementara pada awal tahun 1980 Abdurrahman Wahid dipercaya sebagai wakil katib syuriah PBNU. Di sini Abdurrahman Wahid terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang serius mengenai masalah agama, sosial dan politik dengan berbagai kalangan lintas agama, suku dan disiplin. Abdurrahman Wahid semakin serius menulis dan bergelut dengan dunianya, baik dilapangan kebudayaan, politik, maupun pemikiran keIslaman. Karir yang

³³ Azwir Dainy Tara, *Peran Pengusaha Dalam Membangun Demokrasi*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), Cet 1, h. 114

dianggap menyimpang dalam kapasitasnya sebagai seorang tokoh agama sekaligus pengurus PBNU dan mengundang cibiran adalah ketika menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada tahun 1983. Ia juga menjadi ketua juri dalam festival film Indonesia (FFI) tahun 1986 dan 1987.³⁴

Pada tahun 1984 Abdurrahman Wahid dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim ahlhall wa al-‘aqdi yang diketuai KH. As’ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan ketua umum PBNU pada muktamar ke 27 di Situbondo jabatan tersebut kembali dilakukan pada muktamar ke 28 di pesantren Krapyak Yogyakarta (1989), dan muktamar di Cipasung Jawa Barat (1994). Jabatan ketua umum PBNU kemudian dilepas ketika Abdurrahman Wahid menjabat presiden RI ke 4. Meskipun sudah menjadi presiden ke *nyleneh*-an Abdurrahman Wahid tidak hilang bahkan semakin diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dahulu. Mungkin hanya masyarakat tertentu khususnya kalangan nahdliyin yang merasakan kontroversi gagasannya.

Namun setelah menjabat Presiden, seluruh bangsa Indonesia ikut memikirkan kontroversi gagasan yang dilontarkan oleh K. H. Abdurrahman Wahid. Catatan perjalanan karir Abdurrahman Wahid yang patut dituangkan dalam pembahasan ini adalah menjadi ketua Forum Demokrasi untuk masa bakti 1991-1999, dengan sejumlah anggota yang terdiri dari berbagai kalangan, khususnya kalangan Nasionalis dan non muslim. Anehnya lagi, Abdurrahman Wahid menolak masuk dalam

³⁴ Romdono Muslim, *Tokoh Muslim Indonesia*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 32

organisasi ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Tidak hanya menolak bahkan menuduh organisasi kaum ‘elit Islam’ tersebut dengan organisasi sektarian.³⁵

D. Riwayat Pemikiran

Paparan latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, hingga riwayat karir Abdurahman Wahid di atas memberikan gambaran betapa kompleks dan rumitnya perjalanan Abdurahman Wahid dalam meniti kehidupannya. Abdurahman Wahid bertemu dengan berbagai macam orang yang hidup dengan latar belakang ideologi, budaya, kepentingan, strata sosial dan pemikiran yang berbeda. Dari segi pemahaman keagamaan dan ideologi, Abdurahman Wahid melintasi jalan hidup yang lebih kompleks, mulai yang dari tradisional, ideologis, fundamentalis, sampai modernis dan sekuler.

Dari segi kultural, Abdurahman Wahid mengalami hidup di tengah budaya Timur yang santun, tertutup, penuh basa-basi, sampai dengan budaya Barat yang terbuka, modern dan liberal. Demikian juga persentuhannya dengan para pemikir mulai dari yang konservatif, ortodoks sampai yang liberal dan radikal semua dialami. Pemikiran Abdurahman Wahid mengenai agama yang diperoleh dari dunia pesantren. Lembaga inilah yang membentuk karakter keagamaan yang penuh etik, formal dan struktural. Sementara pengembaraanya ke Timur Tengah telah

³⁵ *Ibid*, h. 33-35

mempertemukan Abdurahman Wahid dengan berbagai corak pemikiran agama, dari yang konservatif, simbolik, fundamentalis sampai yang liberal dan radikal.³⁶

Dalam bidang kemanusiaan, pikiran-pikiran Abdurahman Wahid banyak dipengaruhi oleh para pemikir Barat dengan filsafat humanismenya. Secara rasa maupun praktek perilaku yang humanis, pengaruh para Kyai yang mendidik dan membimbingnya mempunyai andil besar dalam membentuk pemikiran Abdurahman Wahid. Kisah tentang Kyai Fatah dari Tambak Beras, K. H. Ali Ma'shuni dari Krapyak dan Kyai Chudhori dari Tegalrejo telah membuat pribadi Abdurahman Wahid menjadi orang yang sangat peka pada sentuhan-sentuhan kemanusiaan. Dari segi kultural, Abdurahman Wahid melintas tiga model lapisan budaya. Pertama, Abdurahman Wahid bersentuhan dengan kultur dunia pesantren yang sangat hierarkis, tertutup, dan penuh dengan etika yang serba formal. Kedua, dunia Timur yang terbuka dan keras, dan yang ketiga, budaya Barat yang liberal, rasional dan sekuler. Kesemuanya tampak masuk dalam pribadi dan membentuk sinergi. Hampir tidak ada yang secara dominan berpengaruh membentuk pribadi Abdurahman Wahid. Sampai sekarang masing-masing melakukan dialog dalam diri Abdurahman Wahid. Inilah sebabnya mengapa Abdurahman Wahid selalu kelihatan dinamis dan sulit dipahami.³⁷

Posisi Abdurahman Wahid sebagai politis dan pejuang HAM sekaligus adalah sesuatu yang memang langka. Dan kemampuannya melakukan pembedaan secara jernih mengenai posisinya itu adalah suatu yang mengagumkan. Perjuangannya untuk

³⁶ Azwir Dainy Tara, *Peran Pengusaha Dalam Membangun Demokrasi*, Cet. 1, h. 116

³⁷ *Ibid*, 117.

tetap membela hak-hak minoritas tak pernah surut kendati tampak tidak menguntungkan secara politik. Abdurrahman Wahid dan orang-orang tertarik dengannya merupakan generasi neo-modernis Islam, termasuk tokoh-tokoh lain seperti Nurcholis Madjid, Jalaludin Rahmat, Dawam Raharjo dan Amien Rais yang menganjurkan Islamisasi atau re-Islamisasi bangsa Indonesia, Abdurrahman Wahid menekankan Indonesia, pribumisasi atau kontekstualisasi Islam. Dengan cara ini, ia ingin menggabungkan nilai-nilai dan keyakinan Islam dengan kultur setempat. “Sumber Islam adalah wahyu yang mempunyai norma-norma sendiri, karena sifatnya yang permanen. Di sisi lain budaya adalah ciptaan manusia dan oleh karena itu berkembang sesuai dengan perubahan sosial, tetapi hal ini tidak menghalangi manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya.”³⁸

Masalah pribumisasi Islam ada dua tulisan Abdurrahman Wahid yang berkaitan langsung dengan tema sentralnya yaitu: “Salahkan jika dipribumikan? Dan pribumisasi Islam” menurut Abdurrahman Wahid pribumi Islam adalah suatu pemahaman Islam yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dan budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi ushul al-fiqh dan qowaid al-fiqh. Dalam proses ini Abdurrahman Wahid pembaharuan Islam dengan budaya tidak boleh terjadi sebab berbaur berarti hilangnya sifat-sifat asli. Islam harus tetap pada sifat keIslamannya. Al-qur'an harus

³⁸Jhon L Esposito-Jhon O Vall, *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 261-262

tetap dalam bahasa arab, terutama dalam shalat, sebab hal ini merupakan norma. Sedangkan terjemahan Al-qur'an hanyalah untuk mempermudah pemahaman bukan menggantikan Al-qur'an itu sendiri.

Abdurahman Wahid benar-benar sebuah teka-teki, ia bukan tradisionalis konserfatif, bukan pula modernis Islam. Dia seorang pemikir liberal, seorang pemimpin organisasi Islam berbasis tradisi terbesar. Sebagai seorang cendikiawan inovatif yang memeragakan professional biasa atau intelektual, dia memimpin suatu organisasi ulama (NU).

E. Nahdlatul Ulama

1. Awal Keterlibatan

Latar belakang keluarga Wahid segera berarti. Ia akan diminta untuk memainkan peran aktif dalam menjalankan NU. Permintaan ini berlawanan dengan aspirasi Abdurahman Wahid dalam menjadi intelektual publik dan ia dua kali menolak tawaran bergabung dengan Dewan Penasehat Agama NU. Namun, Wahid akhirnya bergabung dengan Dewan tersebut setelah kakeknya, Bisri Syansuri, memberinya tawaran ketiga. Karena mengambil pekerjaan ini, Wahid juga memilih untuk pindah dari Jombang ke Jakarta dan menetap di sana. Sebagai anggota Dewan Penasehat Agama, Wahid memimpin dirinya sebagai reforman NU. Pada saat itu, Abdurahman Wahid juga mendapat pengalaman politik pertamanya. Pada pemilihan umum legislatif 1982, Wahid berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah Partai Islam yang dibentuk sebagai hasil gabungan 4 partai Islam termasuk

NU. Wahid selalu berhasil lepas karena memiliki hubungan dengan orang penting seperti Jendral Benny Moerdani.³⁹

2. Mereformasi NU

Pada saat itu, banyak orang yang memandang NU sebagai organisasi dalam keadaan stagnasi/terhenti. Setelah berdiskusi, Dewan Penasehat Agama akhirnya membentuk Tim Tujuh (yang termasuk Wahid) untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Reformasi dalam organisasi termasuk perubahan kepemimpinan. Pada 2 Mei 1982, pejabat-pejabat tinggi NU bertemu dengan Ketua NU Idham Chalid dan meminta agar ia mengundurkan diri. Idham, yang telah memandu NU pada era transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto awalnya melawan, tetapi akhirnya mundur karena tekanan. Pada 6 Mei 1982, Abdurahman Wahid mendengar pilihan Idham untuk mundur dan menemuinya, lalu ia berkata bahwa permintaan mundur tidak konstitusional. Dengan himbauan Abdurahman Wahid, Idham membatalkan kemundurannya dan Wahid bersama dengan Tim Tujuh dapat menegosiasikan persetujuan antara Idham dan orang yang meminta kemundurannya.

Pada tahun 1983, Soeharto dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan ke-4 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan mulai mengambil langkah untuk menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dari Juni 1983 hingga Oktober 1983, Wahid menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respon NU

³⁹ *Ibid*, h, 263

terhadap isu tersebut. Wahid berkonsultasi dengan bacaan seperti Quran dan Sunnah untuk pembenaran dan akhirnya, pada Oktober 1983, Ia menyimpulkan bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai Ideologi Negara. Untuk lebih menghidupkan kembali NU, Wahid juga mengundurkan diri dari PPP dan partai politik. Hal ini dilakukan sehingga NU dapat fokus dalam masalah sosial daripada terhambat dengan terlibat dalam politik.⁴⁰

3) Terpilih sebagai ketua dan masa jabatan pertama

Reformasi Wahid membuatnya sangat populer di kalangan NU. Pada saat Musyawarah Nasional 1984, banyak orang yang mulai menyatakan keinginan mereka untuk menominasikan Wahid sebagai ketua baru NU. Abdurahman Wahid menerima nominasi ini dengan syarat Ia mendapatkan wewenang penuh untuk memilih para pengurus yang akan bekerja di bawahnya. Wahid terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Musyawarah Nasional tersebut. Namun demikian, persyaratannya untuk dapat memilih sendiri para pengurus di bawahnya tidak terpenuhi. Pada hari terakhir Munas, daftar anggota Wahid sedang dibahas persetujuannya oleh para pejabat tinggi NU termasuk Ketua PBNU sebelumnya, Idham Chalid. Wahid sebelumnya telah memberikan sebuah daftar kepada Panitia

⁴⁰ Mustafa Bisri, *Beyond The Symbol*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 23-24

Munas yang sedianya akan diumumkan hari itu. Namun demikian, Panitia Munas, yang bertentangan dengan Idham.⁴¹

4) Masa jabatan kedua dan melawan Orde Baru

Abdurahman Wahid terpilih kembali untuk masa jabatan kedua Ketua NU pada Musyawarah Nasional 1989. Pada saat itu, Soeharto yang terlibat dalam pertempuran politik dengan ABRI, mulai menarik simpati Muslim untuk mendapat dukungan mereka. Pada Desember 1990, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dibentuk untuk menarik hati Muslim Intelektual. Organisasi ini didukung oleh Soeharto, diketuai oleh Baharuddin Jusuf Habibie dan di dalamnya terdapat intelektual Muslim seperti Amien Rais dan Nurcholish Madjid sebagai anggota. Pada tahun 1991, beberapa anggota ICMI meminta Abdurahman Wahid bergabung. Abdurahman Wahid menolak karena ia mengira ICMI mendukung sektarianisme dan akan membuat Soeharto tetap kuat. Pada tahun 1991, Wahid melawan ICMI dengan membentuk Forum Demokrasi, organisasi yang terdiri dari 45 intelektual dari berbagai komunitas religius dan sosial. Organisasi ini diperhitungkan oleh pemerintah dan pemerintah menghentikan pertemuan yang diadakan oleh Forum Demokrasi saat menjelang pemilihan umum legislatif 1992.⁴²

Pada Maret 1992, Abdurahman Wahid berencana mengadakan Musyawarah Besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 dan mengulang pernyataan dukungan NU terhadap Pancasila. Wahid merencanakan acara itu dihadiri oleh paling sedikit satu

⁴¹ Greg Barton, *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurahman Wahid*, h. 32

⁴² Mustofa Bisri, *Abdurahman Wahid Selama Era Lengser*, (Yogyakarta: 2002), h. 107

juta anggota NU. Namun, Soeharto menghalangi acara tersebut, memerintahkan polisi untuk mengembalikan bus berisi anggota NU ketika mereka tiba di Jakarta. Akan tetapi, acara itu dihadiri oleh 200.000 orang. Setelah acara, Abdurahman Wahid mengirim surat protes kepada Soeharto menyatakan bahwa NU tidak diberi kesempatan menampilkan Islam yang terbuka, adil dan toleran. Selama masa jabatan keduanya sebagai ketua NU, ide liberal Abdurahman Wahid mulai mengubah banyak pendukungnya menjadi tidak setuju. Sebagai ketua, Abdurahman Wahid terus mendorong dialog antar agama dan bahkan menerima undangan mengunjungi Israel pada Oktober 1994.

5) Masa jabatan ketiga dan menuju reformasi

Menjelang Musyawarah Nasional 1994, Abdurahman Wahid menominasikan dirinya untuk masa jabatan ketiga. Mendengar hal itu, Soeharto ingin agar Wahid tidak terpilih. Pada minggu-minggu sebelum munas, pendukung Soeharto, seperti Habibie dan Harmoko berkampanye melawan terpilihnya kembali Abdurahman Wahid. Ketika musyawarah nasional diadakan, tempat pemilihan dijaga ketat oleh ABRI dalam tindakan intimidasi. Terdapat juga usaha menyuap anggota NU untuk tidak memilihnya. Namun, Abdurahman Wahid tetap terpilih sebagai ketua NU untuk masa jabatan ketiga. Selama masa ini, Abdurahman Wahid memulai aliansi politik dengan Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Megawati yang menggunakan nama ayahnya memiliki popularitas yang besar dan berencana tetap menekan rezim Soeharto. Abdurahman Wahid menasehati Megawati untuk berhati-

hati dan menolak dipilih sebagai Presiden untuk Sidang Umum MPR 1998. Megawati mengacuhkannya dan harus membayar mahal ketika pada Juli 1996 markas PDInya diambil alih oleh pendukung Ketua PDI yang didukung pemerintah, Soerjadi.⁴³

Melihat apa yang terjadi terhadap Megawati, Abdurahman Wahid berpikir bahwa pilihan terbaiknya sekarang adalah mundur secara politik dengan mendukung pemerintah. Pada November 1996, Wahid dan Soeharto bertemu pertama kalinya sejak pemilihan kembali Abdurahman Wahid sebagai ketua NU dan beberapa bulan berikutnya diikuti dengan pertemuan dengan berbagai tokoh pemerintah yang pada tahun 1994 berusaha menghalangi pemilihan kembali Abdurahman Wahid. Pada saat yang sama, Abdurahman Wahid membiarkan pilihannya untuk melakukan reformasi tetap terbuka dan pada Desember 1996 bertemu dengan Amien Rais, anggota ICMI yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.⁴⁴

Juli 1997 merupakan awal dari Krisis Finansial Asia. Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Abdurahman Wahid didorong untuk melakukan reformasi dengan Megawati dan Amien, namun ia terkena stroke pada Januari 1998. Dari rumah sakit, Abdurahman Wahid melihat situasi terus memburuk dengan pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden dan protes mahasiswa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan Mei 1998 setelah penembakan enam mahasiswa di Universitas Trisakti. Pada tanggal 19 Mei 1998, Abdurahman Wahid bersama

⁴³ Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 92

⁴⁴ Mustofa Bisri, *Abdurahman Wahid Selama Era Lengser*, h, 108-109

dengan delapan pemimpin penting dari komunitas Muslim, dipanggil ke kediaman Soeharto. Soeharto memberikan konsep Komite Reformasi yang ia usulkan. Sembilan pemimpin tersebut menolak untuk bergabung dengan Komite Reformasi. Abdurrahman Wahid memiliki pendirian yang lebih moderat dengan Soeharto dan meminta demonstran berhenti untuk melihat apakah Soeharto akan menepati janjinya. Hal tersebut tidak disukai Amien, yang merupakan oposisi Soeharto yang paling kritis pada saat itu. Namun, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Wakil Presiden Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto.

6) Era Reformasi

Pada awal tahun 1998 rezim Orde Baru sudah tidak mampu membendung arus Reformasi yang bergulir begitu cepat. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri maka bangsa Indonesia memasuki babak baru. Yang dimulai dari Presiden BJ. Habibie segera melakukan langkah-langkah pembaruan sebagaimana tuntutan Reformasi. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang menampilkan energi yang luar biasa, tekad untuk menggulingkan unsur-unsur sentralistik dan hierarkis yang represif (menindas) semasa pemerintahan Soeharto dan kesediaan untuk berfikir kreatif sehingga banyak pihak mengaguminya. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang

tetap tabah dalam menghadapi dalam berbagai macam kasus, seperti kasus pengeboman, KKN, maupun bencana alam.⁴⁵

Setelah masa kepemimpinan Presiden Soekarnoputri berakhir selanjutnya dilanjutkan oleh masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sampai sekarang. Bulan-bulan pertama pemerintahan Abdurrahman Wahid menunjukkan gabungan dari harapan, janji, visi, kebingungan, dan kekecewaan. Hal tersebut mengingat kepada kondisi kesehatannya yang buruk dan kekuatan-kekuatan politik yang bersatu menentanginya, namun Abdurrahman Wahid menampilkan energi yang luar biasa tekad yang kuat untuk menggulingkan unsur-unsur sentralistis dan hierarkis yang menindas semasa pemerintahan Soeharto, dan kesediaan untuk berfikir kreatif sehingga banyak pihak mengaguminya dan juga kunjungan ke luar negeri yang dilakukannya menghasilkan banyak mitra luar negeri, serta berhasil mengurangi dukungan bagi kaum separatis GAM di Aceh meskipun kunjungannya menuai kritik dari berbagai pihak, selain itu Abdurrahman Wahid mendorong pluralisme dan keterbukaan.

Dia memperbolehkan umat Cina Konfusius untuk melakukan perayaan secara terbuka, yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Akibat munculnya ketidakpercayaan parlemen pada Presiden Abdurrahman Wahid, maka kekuasaan Abdurrahman Wahid berakhir pada tahun 2001. DPR/MPR kemudian memilih dan mengangkat Megawati

⁴⁵ Abdurrahman Wahid, *Demokratisasi Hidup Bangsa* (Jakarta: 2004). h, 1.34

Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden Indonesia.⁴⁶

F. Karya-Karya Intelektual K. H. Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid adalah seorang Intelektual bebas (Independen), atau mungkin - meminjam istilah Antonio Gramsci "Intelektual Organik" dari tradisi akademik pesantren, sehingga tulisan-tulisannya cenderung bersifat reflektif, membumi, terkait dengan dunia penghayatan realitas, bahkan senantiasa bermotifkan transformatif. Referensi formal Akademis dan pengikatan diri terhadap satu metodologi tidaklah menjadi penting, sepenting substansi yang disampaikannya.

Sejumlah karya tulis ini membuktikan intelektualisme Abdurrahman Wahid yang kaya dengan gagasan dan pemikiran yang kreatif transformatif dan inovatif. Tulisan-tulisan ini juga mungkin suatu bukti bahwa gerakan atau aksi Abdurrahman Wahid tidak hampa teori atau tidak tanpa visi, yang suatu waktu dapat terjerumus pada oportunisme dan pragmatisme politik. Ketajamannya membaca realitas dan kekritisannya mengambil keputusan dapat dilihat dari kecenderungan tulisan-tulisan tersebut.⁴⁷

Ketujuh tema pokok ini juga menandai gagasan besar yang menjadi perhatian Abdurrahman Wahid selama ini, baik melalui tulisannya maupun visi gerakannya.

Tujuh hal yang dimaksud adalah:

⁴⁶ *Ibid*, h. 36

⁴⁷ Muntaha Azharidan Mun'im Saleh (ed.), *Indonesia Menatap Masa Depan*, (Jakarta: P3M, 1989), h.198-199

1. Pandangan dunia pesantren.
2. Pribumisasi Islam.
3. Keharusan demokrasi.
4. Finalitas, negara-bangsa pancasila.
5. Pluralisme agama.
6. Humanitarinisme universal, dan
7. Antropologi kiai.

Ketujuh tema pokok ini secara umum menjelaskan keluasan wawasan dan besarnya perhatian Abdurahman Wahid terhadap tema-tema kontemporer yang menjadi isu global abad XX, yakni demokrasi, HAM, Lingkungan hidup, dan Gender. Tema-tema pokok inilah barangkali yang melandasi seluruh gerakan Abdurahman Wahid selama ini, baik dalam wilayah keagamaan, politik, kebudayaan maupun ekonomi. Seluruh tema tersebut, dalam banyak tulisan dibidik Abdurahman Wahid dari pemahaman keagamaan (Islam) melalui kekeyaan intelektual dan kebudayaan pesantren.⁴⁸

BAB III

ABDURAHMAN WAHID DALAM POLITIK DI INDONESIA

(1999-2001)

⁴⁸ *Ibid*, h. 83.

A. Peran Abdurahman Wahid Dalam Politik Di Indonesia

Sebelum membahas tentang peran Abdurahman Wahid dalam politik di Indonesia, peneliti akan menjelaskan secara umum tentang peran. Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dan lain-lain. Peran berasal dari kata *Peran*, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama peran berarti laku, bertindak. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Peranan utama seseorang pemimpin ialah mengajak atau meyakinkan atau pengikut sedemikian rupa, agar mereka mau memberikan kontribusi untuk mencapai suatu tujuan dengan kemampuan maksimal mereka. Seorang pemimpin merupakan orang yang dikagumi oleh orang lain atau bawahan sehingga ada kecenderungan apa yang dilakukan dan dimiliki untuk ditiru.⁴⁹

Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu **pertama** penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur di zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seseorang aktor dalam suatu ⁴² sentas dengan lakon tertentu. **Kedua**,

⁴⁹ Wahdjosumidjo, *Kiat Kepemimpinan Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : PT. Harapan Masa PGRI, 1994), h, 20.

pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawa seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak mesti lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa.⁵⁰ Jadi peran disini dimaksudkan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Peran Abdurahman Wahid dalam kedudukannya sebagai presiden dan pemerintahan yang singkat lebih kurang 2 tahun, reformasi kebijakan-kebijakan politik yang mengundang kontroversi.

1) Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan bapak Pluralisme di Indonesia, hal itu dikarenakan semasa hidupnya Abdurrahman Wahid selalu membela kaum minoritas dan sangat anti dengan yang namanya kekerasan dan ketidakadilan. bahkan dengan gagahnya Abdurrahman Wahid berani meresmikan agama baru yaitu Konghucu menjadi agama resmi di Indonesia. Menurut Abdurrahman Wahid Tuhan itu gak perlu dibela, tapi manusia sebagai makhluknya lah yang harus di bela. Sehingga apabila setiap golongan merasa saya yang paling benar itu suatu kesalahan, karena agama Islam mewajibkan kita itu untuk menyebarkan nafas nafas Islam dalm

⁵⁰ Ridjaluddin, *Demokrasi Pemikiran Gus Dur dan Keterpaduannya Dengan Demokrasi Amien Rais dan Syafi' Ma'arif*, (Jakarta: LKis, 2002). h. 3-4

kehidupan budaya Indonesia, bukan lah mendirikan Negara Islam. Sehingga kata-kata yang sering keluar dari mulutnya yaitu “Pribumisasi” bukan lah “Arabisasi”.

Abdurahman Wahid tidak sedikitpun memberikan gambaran dirinya sebagai penganut Pluralisme dengan pengertian pembenaran seluruh agama atau aliran kepercayaan lainnya dinilai sama derajat keimanannya. Abdurahman Wahid memberikan rasa hormatnya kepada setiap ajaran agama atau kepercayaan yang diimani oleh penganutnya. Sikap Abdurahman Wahid menghormati keyakinan yang berbeda tidaklah berarti Abdurahman Wahid adalah penganut Pluralisme yang membenarkan dan mensejajarkan ajaran agama sama dengan aliran sekularisme. Sebagai Guru Bangsa, Abdurahman Wahid berpartisipasi aktif melindungi pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaannya sebagaimana yang tertera dalam UUD 1945 Bab XI Pasal 29 butir dua. Sayangnya, gelar Bapak Pluralisme dikumandangkan pada saat Abdurahman Wahid dan Presiden ke-4 RI pulang ke Rahmatullah.⁵¹

Namun disayangkan pluralisme di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang ingin diwujudkan oleh Abdurahman Wahid sempat mengalami permasalahan dikarenakan terjadinya kerusuhan berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan seperti adanya kerusuhan Sampit yaitu pertikaian antara suku Dayak dan Madura yang banyak memakan korban jiwa dan kerusuhan ini terjadi pada tanggal 27 Februari 2000.

⁵¹ Zaenuddin, *Prospek Gerakan Oposisi Dalam Era Pemerintahan Gus Dur-Megawati* (Jakarta: PT. Rajawali Pers), h. 117

Dalam kapasitas dan ambisinya, Presiden Abdurrahman Wahid sering melontarkan pendapat kontroversial. Ketika menjadi Presiden RI ke-4, ia tak gentar mengungkapkan sesuatu yang diyakininya benar kendati banyak orang sulit memahami dan bahkan menentangnya. Kendati suaranya sering mengundang kontroversi, tapi suara itu tak jarang malah menjadi kemudi arus perjalanan sosial, politik dan budaya ke depan. Dia memang seorang yang tak gentar menyatakan sesuatu yang diyakininya benar. Bahkan dia juga tak gentar menyatakan sesuatu yang berbeda dengan pendapat banyak orang. Jika diselidik, kebenaran itu memang seringkali tampak radikal dan mengundang kontroversi.⁵²

Kendati pendapatnya tidak selalu benar untuk menyebut seringkali tidak benar menurut pandangan pihak lain adalah suatu hal yang sulit dibantah bahwa banyak pendapatnya yang mengarahkan arus perjalanan bangsa pada rel yang benar sesuai dengan tujuan bangsa dalam Pembukaan UUD 1945. Bagi sebagian orang, pemikiran-pemikiran Abdurrahman Wahid sudah terlalu jauh melampaui zaman. Ketika ia berbicara pluralisme diawal diawal reformasi, orang-orang baru mulai menyadari pentingnya semangat pluralisme dalam membangun bangsa yang beragam di saat ini.

2) Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa saat kemudian, Akbar Tanjung, ketua Golkar dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Golkar akan mendukung Abdurrahman Wahid. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul

⁵² *Ibid*, h. 118

dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara.⁵³

Pasca kejatuhan rezim Orde Baru pada 1998, Indonesia mengalami ancaman disintegrasi kedaulatan negara. Konflik meletus di beberapa daerah dan ancaman separatisme semakin nyata. Menghadapi hal itu, setelah pengangkatan dirinya sebagai Presiden, Abdurrahman Wahid melakukan pendekatan yang lunak terhadap daerah-daerah yang berkecamuk. Terhadap Aceh, Abdurrahman Wahid memberikan opsi referendum otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dilakukan Abdurrahman Wahid dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Netralisasi Irian Jaya dilakukan Abdurrahman Wahid pada 30 Desember 1999 dengan mengunjungi ibukota Irian Jaya. Selama kunjungannya, Presiden Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.

Abdurrahman Wahidlah menjadi pemimpin yang meletakkan fondasi perdamaian Aceh. Pada pemerintahan Abdurrahman Wahidlah, pembicaraan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Indonesia menjadi terbuka. Padahal, sebelumnya, pembicaraan dengan GAM sesuatu yang tabu, sehingga peluang perdamaian seperti ditutup rapat, apalagi jika sampai mengakomodasi tuntutan kemerdekaan. Saat sejumlah tokoh nasional mengecam pendekatannya untuk Aceh, Abdurrahman Wahid tetap memilih

⁵³ Ridjaluddin, *Demokrasi Pemikiran Gus Dur dan Keterpaduannya Dengan Demokrasi Amien Rais dan Syafi' Ma'arif*, h. 5-6

menempuh cara-cara penyelesaian yang lebih simpatik: mengajak tokoh GAM duduk satu meja untuk membahas penyelesaian Aceh secara damai. Bahkan secara rahasia Abdurahman Wahid mengirim Bondan Gunawan, Pjs (pejabat sementara) Menteri Sekretaris Negara, menemui Panglima GAM Abdullah Syafii di pedalaman Pidie. Di masa Abdurahman Wahid. pula, untuk pertama kalinya tercipta Jeda Kemanusiaan. Selain usaha perdamaian dalam wadah NKRI, Abdurahman Wahid. disebut sebagai pionir dalam mereformasi militer agar keluar dari ruang politik.⁵⁴

B. Pemerintahan Abdurahman Wahid (1999-2001)

K. H. Abdurahman Wahid (Gus Dur) terpilih menjadi presiden RI (Republik Indonesia) keempat setelah menang dalam Pemilu pada bulan Oktober 1999, ia terpilih setelah mengalahkan Megawati lewat pemungutan suara (*voting*) yang tertutup dan rahasia, dari 691 anggota MPR yang mengikuti suara dalam pemilihan presiden tersebut, K. H. Abdurahman Wahid memperoleh 373 suara sedangkan megawati memperoleh 313 suara. K. H. Abdurahman Wahid yang menang dalam voting tersebut akhirnya menjadi presiden, sedangkan Megawati menjadi wakil presiden.⁵⁵ Setelah menjadi Presiden, K. H. Abdurahman Wahid membentuk Kabinet yang disebut Persatuan Nasional, ini adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik antara lain PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK), non partisan dan juga TNI juga ada dalam kabinet tersebut.

⁵⁴ Abdul Munir Mul Khan, *Perjalanan Politik Gus Dur* (Jakarta: PT. Kompas, 2010), h. 68

⁵⁵ Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi* (Jakarta : Kencana Media Group, 2011), h. 95

Dalam menyusun Kabinet Persatuan Nasional, agaknya pertimbangan kompromi politik lebih tinggi ketimbang pertimbangan profesional. Kabinet ini terdiri atas berbagai partai yang mendukungnya untuk menjadi Presiden. Kabinet ini lahir di era krisis yang multi dimensi. Tugas itu ditambah pula untuk memenuhi harapan masyarakat mencapai Indonesia baru yang tertib, efisien dan demokratis. Kabinet ini juga diharapkan dapat menjadi Kabinet pertama dalam membangun tradisi pemerintahan yang bersih dan efektif. Berikut beberapa kebijakan penting selama K. H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden :

1) Dibidang Politik

Kebijakan awal pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah membubarkan Departemen Penerangan. Dimasa Orde Baru Departemen penerangan merupakan alat bagi Presiden Soeharto untuk mengekang kebebasan pers, dengan dibubarkannya Departemen tersebut maka kebebasan pers di Indonesia semakin terjamin.⁵⁶ Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), yang selama pemerintahan Habibie menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan dijadikan kementerian non portofolio alias menteri negara. Akibatnya Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah tak punya kaki di daerah Ini sekaligus menandai disisihkannya kembali sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak.⁵⁷

Keadaan ini berlangsung sampai sekarang. Lalu Panglima TNI, yang selama puluhan tahun selalu dipegang Angkatan Darat, diberikan Abdurahman Wahid kepada

⁵⁶ Andrew Kamal, *Spirit 5 Presiden RI* (Yogyakarta Syura Media Utama, 2012), h 105

⁵⁷ Ishak Rafick, *Catatan Hitam Presiden Indonesia* (Jakarta : PT. Cahaya Insan Suci, 2008), h, 201

Laksamana Widodo HS dari Angkatan Laut. Kemudian ada juga kebijakan untuk mencabut TAP MPR-RI tentang larangan terhadap Partai Komunis, ajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme . Lawan politik KH. Abdurrahman Wahid menganggap kebijakan ini hanya kepentingan KH. Abdurrahman Wahid semata, untuk mendapat simpati dari para keluarga mantan tahanan politik yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pada titik ini Abdurrahman Wahid mulai membuka hubungan langsung dengan Israel dan tidaklah gampang dijalankan. Protes dan unjuk rasa ke tidak setuju marak di seantero negeri. Akibat keinginan membuka hubungan langsung dengan Israel itu Presiden Abdurrahman Wahid yang sampai saat itu masih tercatat sebagai salah satu pendiri Yayasan Shimon Peres yang berkedudukan di Tel Aviv, langsung dituduh sebagai agen Yahudi oleh para demonstran. Melihat gelagat tidak menguntungkan itu, para wakil rakyat lantas meminta Pemerintah menunda pembukaan hubungan tersebut. Pemerintah memang menyatakan menundanya, tetapi Abdurrahman Wahid secara terbuka menganggap pembukaan hubungan dagang dengan Israel itu sah-sah saja. Bagi Presiden pembukaan kontak dagang dengan Israel lebih pantas ketimbang dengan Rusia, Cina atau Korea Utara, Mereka terang-terangan atheis, menentang Tuhan Sementara orang Yahudi dan Nasrani masih mengakui adanya Tuhan. Agama Islam masih satu rumpun dengan mereka, agama samawi.

Membuka hubungan dagang dengan Israel jauh lebih menguntungkan daripada membiarkannya berjalan sembunyi-sembunyi sebagaimana terjadi selama ini. Memang data resmi atas Perdagangan Israel di Singapura menunjukkan sepanjang

1999 nilai ekspor Indonesia ke Negeri Zionis itu mencapai US\$ 11 juta. Sedang impor Indonesia dari negeri itu mencapai US\$ 6 juta. Semuanya dilakukan melalui pihak ketiga, seperti Singapura dan Belgia.⁵⁸

Kebijakan lain yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid Selama pemerintahannya adalah mengeluarkan Peraturan Presiden No.6/2000 yang mencabut Instruksi Presiden No.14/1967 yang dikeluarkan pemerintahan Suharto. Inpres itu melarang segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat umum. Dengan pencabutan larangan tersebut maka terbuka jalan bagi etnik Tionghoa untuk menghidupkan budaya tradisional mereka. Dalam tahun 2000 itu juga Abdurrahman Wahid mengumumkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Dengan demikian maka etnis Cina atau Tionghoa yang selama kekuasaan Orde Baru mengalami diskriminasi, maka semenjak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terlepas dari diskriminasi.⁵⁹

Penulis menganggap bahwa di era pemerintahan Abdurrahman Wahid masyarakat Tionghua diberikann kebebasan untuk merayakan Tahun Baru Imlek, dan ini dibuktikan Abdurrahman Wahid sebagai figur yang mementingan masyarakat Indonesia. Dan sampai sekarang Tahun Imlek tetap dirayakan masyarakat Tionghua.

2) Dibidang Ekonomi

⁵⁸ *Ibid*, h. 203

⁵⁹ Abdul Munir Mulkhan, *Perjalanan Politik Gus Dur*, (Jalkarta: PT. Kompas, 2010), h. 90

Untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dewan Ekonomi nasional diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim, wakilnya Subiyakto Tjakrawerdaya dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indraswari.

Presiden Abdurrahman Wahid mewarisi ekonomi Indonesia yang relatif lebih stabil dari pemerintahan Habibie, nilai tukar Rupiah berada dikisaran Rp 6.700/US\$. indeks harga saham gabungan (IHSG) berada di level 700. Dengan bekal ini ditambah legitimasi yang dimilikinya sebagai presiden bersama wapres yang dipilih secara demokratis, Indonesia mestinya sudah bisa melaju kencang. Namun Presiden Abdurrahman Wahid bersama kabinetnya menolak melanjutkan semua hasil kerja keras kabinet pemerintahan Habibie misalnya Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), yang selama pemerintahan Habibie menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dijadikan kementerian nonportofolio atau menteri negara non Departemen.⁶⁰

Meskipun begitu ditengah anggaran negara yang minus sekitar Rp 42 triliun, sepanjang tahun 2000 ekonomi Indonesia menggeliat pasti. Bila tahun 1999 ekonomi Indonesia cuma membukukan pertumbuhan 0,13%. maka di tahun 2000-an ketika Presiden Abdurrahman Wahid berkuasa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3-4%. Sementara inflasi bertengger pada angka terkendali, sekitar 7%. Hal ini disebabkan oleh konsumsi yang Tertunda, dulu orang menunda konsumsinya karena

⁶⁰ Ishak Rafick, *Catatan Hitam Presiden Indonesia* , h, 211

krisis dan menyimpan uangnya dibank sekarang mereka mengonsumsikannya. Kemudian naiknya ekspor komoditas pertanian dan elektronik, yang diuntungkan oleh rendahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar. Naiknya harga minyak dan gas bumi juga menjadi faktor penting dalam menambah pemasukan keuangan Negara. Selama pemerintahan Abdurrahman Wahid IMF tak pernah mencairkan pinjamannya, Bagaimanapun juga presiden Abdurrahman Wahid telah membuktikan kepada dunia luar, bahwa Indonesia bisa diurus tanpa bantuan dana dari IMF. Pemerintahan Abdurrahman Wahid juga memiliki gagasan sekuritisasi aset yaitu aset- aset negara, terutama barang tambang bisa dinilai dulu, kemudian pemerintah bisa mengeluarkan saham atas aset-aset Negara tersebut yang kemudian diperjual-belikan dipasar modal untuk membiayai pembangunan nasional. namun sayangnya hal itu tidak dapat terwujud karena Abdurrahman Wahid berhasil dilengserkan oleh MPR melalui Sidang Istimewa kedudukannya kemudian digantikan oleh Megawati.⁶¹

3) Dibidang Militer

Pemerintahan Abdurrahman Wahid untuk melanjutkan proses reformasi militer mengambil tindakan untuk menciptakan supremasi sipil dengan cara memilih Menteri Pertahanan dari kalangan sipil yaitu menunjuk Juwono Sudarsono yang kemudian digantikan oleh Prof. Dr. Mahfud M.D. Salah satu langkah lain yang diambil Abdurrahman Wahid adalah dengan memilih Laksamana Widodo A. S yang berasal dari Angkatan Laut sebagai Panglima TNI. Pemilihan Laksamana Widodo A.S ini merupakan suatu dobrakan atas tradisi mengingat dari awal berdirinya organisasi

⁶¹ *Ibid*, h, 218

militer di Indonesia, Angkatan Darat selalu menempati pucuk tertinggi. Di samping itu, ada lima kebijakan yang lain diambil oleh Abdurahman Wahid untuk mereformasi militer dan menciptakan supremasi sipil, yaitu :⁶²

1. Mengurangi jumlah perwira yang duduk di jabatan publik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah seperti jabatan direktur jendral, inspektur jendral, jabatan setingkat menteri lain yang menjadi langganan perwira militer, gubernur, bupati, dan walikota.
2. Memisahkan secara tegas Polisi dari struktur militer sehingga Kapolri langsung berada di bawah komando Presiden.
3. Membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) dalam kaitannya dengan peristiwa Timor Timur, Tanjung Priok, dan Trisakti yang diduga melibatkan personil TNI.
4. Penyelesaian masalah Gerakan Separatis di Aceh yang lebih mengutamakan pendekatan dialogis daripada pendekatan dengan kekuatan militer.
5. Pergantian Menko Polsoskam dari Jendral (Purn) Yudhoyono kepada Jendral (Purn) Agum Gumelar karena Yudhoyono ditengarai membahayakan pemerintahan Wahid sebagai simbolisasi supremasi sipil.

4) Dibidang Hukum

⁶² Muhaimin, *Bambu Runcing dan Mesiu* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2008), h. 53

Ketetapan MPR/VI/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Pasal 1 dari

Tap berbunyi, “Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masingmasing.” Pasal 2 dari Tap tersebut menyiratkan usaha untuk memperkuat, dengan cara mempertegas peran TNI dan Polri. Ayat (1) berbunyi, “TNI adalah alat yang berperan dalam pertahanan Negara.” Ayat (2) berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berpera dalam memelihara keamanan.”

Dalam pembahasan ini, maka langkah setrategis yang diambil K.H. Abdurrahman Wahid adalah realisasi pemisahan TNI-Polri dan menempatkan lembaga TNI dan Polri dibawah lembaga kePresidenan langsung. Ini merupakan langkah maju untuk menyibak tabir kerancuan antara tugas dan wewenang TNI dan Polri. Dalam hal ini, pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid telah mampu menindaklanjuti cita-cita reformasi dengan mengeluarkan kebijakan yang gagasannya dimulai pada masa Presiden BJ. Habibie melalui intruksi Presiden No. 2/1999.⁶³

Keppres ini kemudian dikongkritkan oleh K.H. Abdurrahman Wahid dengan menerbitkan Keppres Nomor 89 Tahun 2000 tentang kedudukan kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 1 Keppres itu berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung dibawah Presiden”.Terdapat pula PP No.19/2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Di

⁶³ Iskandar, Muhaimin, *Gus Dur Yang Saya Kenal ; Sebuah Catatan Transisi Demokrasi Kita*, Cet. I, Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2004, h. 48

luar itu ada juga komitmen untuk memberantas korupsi dan keluarnya PP No.71/2000 tentang peran-serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Tim yang terbentuk tersebut ternyata tidak berjalan efektif karena tidak didukung komitmen politik.

Terkait dengan mantan Presiden Soeharto yang diduga terlibat kasus-kasus KKN di masa pemerintahannya. Maka pemerintahan Abdurrahman Wahid membuka kembali penyidikan Soeharto untuk kasus 3 Yayasannya, Dharmais, Supersemar dan Dakab, dimana Soeharto sebagai tersangkanya. Ketiga Yayasan ini diduga memperoleh dana dari semua BUMN dengan penyalahgunaan wewenang melalui PP No.15 tahun 1976 dan Kepmenkeu No.33 tahun 1978. Penyalurannya disinyalir hanya kesejumlah kroninya saja. Dengan demikian, ada penyalahgunaan keuangan negara tidak kepada seluruh rakyat tetapi kepada beberapa orang saja, dan ini jelas melanggar ketentuan UU D1945 khususnya Pasal 33, yaitu pasal yang merupakan aturan dasar pemerintah, maupun rakyatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengatur berbagai hal, dari hal-hal sederhana hingga berbagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Setelah melalui proses panjang, dan peradilan dijalankan tetapi Jaksa selaku penuntut umum tidak pernah bisa menghadirkan Soeharto di Pengadilan. Sehingga pada putaran ketiga sidang pengadilan terhadap Soeharto, Hakim menetapkan bahwa kasus Soeharto tidak bisa diadili karena tiga kali Jaksa tidak bisa menghadirkan terdakwa.

Dengan demikian maka Abdurrahman Wahid pun gagal untuk mengadili Soeharto atas semua dugaan KKN yang beliau lakukan selama berkuasa.⁶⁴

Abdurrahman Wahid sendiri dimasa kekuasaannya diduga terlibat KKN yaitu kasus penyalah-gunaan dana yayasan Kesejahteraan Karyawan Bulog (*bullogate*), penyalah-gunaan dana bantuan Sultan Brunei (*Bruneigate*). DPR mengusulkan untuk melakukan penyelidikan atas kasus Bullogate dan Bruneigate, yang akhirnya diterima DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) kasus Yanatera Bulog dan bantuan Sultan Brunei Darussalam pada tanggal 5 September 2000.⁶⁵ Setelah bekerja hampir lima bulan, Pansus merampungkan penyelidikannya dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada rapat Paripurna DPR pada tanggal 5 Januari 2001. Laporan tersebut, menyimpulkan bahwa Abdurrahman Wahid diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog, dan terdapat inkonsistensi pernyataan presiden tentang masalah bantuan Sultan Brunei Darussalam, sehingga menunjukkan bahwa presiden telah menyampaikan keterangan yang tidak benar pada masyarakat.

Kesimpulan Pansus tersebut disetujui Paripurna DPR, kecuali FKB dan pada rapat yang sama DPR memutuskan, menindaklanjuti hasil Pansus dengan menyampaikan Memorandum, mengingatkan Presiden Abdurrahman Wahid sungguh-sungguh melanggar haluan negara, yaitu: melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan, dan

⁶⁴ *Ibid*, h. 66

⁶⁵ Zaenuddin, *Prospek Gerakan Oposisi Dalam Era Pemerintahan Gus Dur-Megawati* (Jakarta: PT. Rajawali Pers), h. 143

melanggar ketentuan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.⁶⁶

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran hukum, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menyerahkan persoalan ini untuk diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh proses dan hasil Rapat Paripurna termasuk hasil keputusannya kemudian dikirim kepada presiden. Tiga bulan setelah Memorandum I, DPR mengeluarkan Memorandum II, yang dilanjutkan dengan permintaan DPR kepada MPR satu bulan sesudahnya untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa karena menganggap Presiden Abdurrahman Wahid tidak mengindahkan Memorandum.⁶⁷

MPR melalui Badan Pekerja MPR menetapkan Sidang Istimewa pada tanggal 1-7 Agustus 2001 dengan alternatif percepatannya berdasarkan permintaan DPR, sebelum Sidang Istimewa dilaksanakan, pada tanggal 19 Juli 2001 presiden meminta persetujuan DPR untuk mendukung rencana penetapan Komisaris Jenderal Chaeruddin Ismail sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal S. Bimantoro. Permintaan presiden tersebut tidak disetujui DPR, namun Abdurrahman Wahid tetap melantik Komisaris Jenderal Chaeruddin Ismail sebagai Pjs (Pejabat Sementara). Kapolri tanpa persetujuan DPR, walaupun DPR meminta presiden untuk menunda pelantikan Kapolri baru. Akibatnya MPR mempercepat Sidang Istimewa yang sebelumnya direncanakan pada awal bulan Agustus menjadi tanggal 23 Juli 2001 karena adanya

⁶⁶ *Ibid*, h. 151

⁶⁷ Edi Budiayoso, *Melawan Skenario Makar: Tragedi 8 Perwira Polri di Balik Kejatuhan Gus Dur* (Jakarta: Pensil, 2010), h. 9

pelantikan Pjs (Pejabat Sementara) Kapolri tersebut. Pada dini hari sebelum Sidang Istimewa dibuka, Presiden Abdurrahman Wahid mengumumkan maklumat membekukan MPR dan DPR yang secara resmi ditolak oleh MPR.

Pihak DPR dan MPR jelas menolak maklumat presiden ini. Ketua DPR Akbar Tanjung menyatakan DPR menolak maklumat karena bertentangan dengan Penjelasan UUD. Sedang pembubaran MPR, menurut Akbar dari segi logika hukum saja sudah bertentangan. MPR adalah lembaga tertinggi, sedangkan presiden adalah lembaga tinggi. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden karena dipilih oleh MPR. Namun akhirnya Abdurrahman Wahid tidak mendapat dukungan dan MPR mengesahkan pemberhentian Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Sidang Istimewa pada tanggal 23 Juli 2001.⁶⁸

Penulis berpendapat Munculnya konflik panjang antara para politisi DPR dan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid selama pemerintahannya yang ditandai dengan kekecewaan kekecewaan kalangan poros tengah sebagai pengusung naiknya K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden, ketika Presiden K.H. Abdurrahman Wahid membiarkan Menko Kesra dan Taskin, Hamzah Haz yang juga ketua umum PPP mengundurkan diri dari kabinet yang hanya sebulan setelah pembentukannya.

5) Bidang Sosial dan Budaya

⁶⁸ Khamami Zada, *Neraca Gus Dur Di Panggung Kekuasaan* (Jakarta: Lakpesdam NU, 2002), h. 216

Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama, Abdurahman Wahid memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hak itu dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu :

a) **Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000** mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres No. 6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka seperti misalnya pertunjukan Barongsai.

b) **Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK)** sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional. Disamping pembaharuan-pembaharuan di atas, Abdurahman Wahid juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang dinilai Kontroversial dengan MPR dan DPR, yang dianggap berjalan sendiri, tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan, melainkan diselesaikan sendiri berdasarkan pendapat kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi negara. Kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontroversial dari berbagai kalangan yaitu :

- a) Pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi yang dianggap Orde Baru.
- b) Pencopotan Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudradjat, yang dilatarbelakangi oleh adanya pernyataan bahwa Presiden bukan merupakan Panglima Tinggi.

- c) Pencopotan Wiranto sebagai Menkopolkam, yang dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak harmonis dengan Abdurahman Wahid.
- d) Mengeluarkan pengumuman tentang menteri Kabinet Pembangunan Nasional yang terlibat KKN sehingga mempengaruhi kinerja kabinet menjadi merosot.
- e) Abdurahman Wahid menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora.⁶⁹

Puncak jatuhnya Abdurahman Wahid dari kursi kepresidenan ditandai oleh adanya Skandal Brunei Gate dan Bulog Gate yang menyebabkan ia terlibat dalam kasus korupsi, maka pada tanggal 1 Februari 2006 DPR-RI mengeluarkan memorandum yang pertama sedangkan memorandum yang kedua dikeluarkan pada tanggal 30 April 2001. Abdurahman menanggapi memorandum tersebut dengan mengeluarkan maklumat atau yang biasa disebut Dekrit Presiden yang berisi antara lain :

- 1) Membekukan MPR / DPR-RI.
 - 2) Mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk pemilu dalam waktu satu tahun.
 - 3) Membubarkan Partai Golkar karena dianggap warisan orde baru
- Dalam kenyataan, Dekrit tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka MPR segera mengadakan Sidang Istimewa pada tanggal 23 Juli 2001 dan Megawati

⁶⁹ Choirie Efendi, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002), h. 45

Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Abdurahman Wahid berdasarkan Tap MPR No. 3 tahun 2001 dengan wakilnya Hamzah.⁷⁰

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Abdurahman Wahid dalam politik di Indonesia (1999-2001) yakni, kiprahnya sebagai presiden RI dalam mereformasi Indonesia berdasarkan Pancasila. K. H. Abdurahman Wahid membentuk Kabinet yang disebut Persatuan Nasional, ini adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik antara lain PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK), non partisan dan juga TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Dan beberapa kebijakan penting selama K. H. Abdurrahman Wahid yaitu : bidang politik, bidang ekonomi, bidang militer, bidang hukum, bidang sosial dan budaya. Kebijakan-kebijakannya yang kadang terlalu progresif sering membuat orang sibuk menebak, apa yang sedang dipikirkan Abdurahman Wahid selama waktu-waktu tersebut. Pada pemerintahan Abdurahman Wahid juga dibuka kran kebebasan dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Beliau juga telah membawa Indonesia ke dalam taraf demokratisasi yang lebih baik lagi.

Ide sosial-politik Abdurahman Wahid yang diperjuangkan didunia politik Indonesia. *Pertama*, dalam hal Demokratisasi di Indonesia, Abdurahman Wahid memperjuangkan

⁷⁰ *Ibid*, h. 46

kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, pluralism dan humanisme. *Kedua*, pluralisme dalam menjaga dinamisasi keagamaan. *Ketiga*, nasionalisme, Abdurahman Wahid memperjuangkan dan mempertahankan NKRI dengan berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan setelah melakukan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Diadakan penelitian lanjutan mengenai pemikiran tokoh tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.
- b. Bagi mahasiswa, dapat dijadikan bahan masukan untuk mengadakan penelitian mengenai peran Abdurahman Wahid sehingga ditemukan beberapa teori-teori baru dari pemikiran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Husain. *NU menyongsong Tahun 2000*. Kendal : CV Noer Chamid, 1989.
- Afandi Arief. *Islam Demokrasi Atas Bawah, Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur Dan Amin Rais*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997.
- Agus Maimun dan Arief Furchan. *Studi Tokoh, Metode Penelitian Tokoh*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2005.
- Alfian. *Pemikiran Politik dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta : Gramedia, 1983.
- Ali M. Sayuti. *Metode Penelitian Agama(Pendekatan Teori dan Praktek)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Anam Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Sala : Jatayu, 1985.
- Bakri Syamsul. *Jombang Kairo, Jombang Chicago*. Solo: Tiga Serangkai, 2004.
- Barton Greg. *Biografi Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Bisri A. Mustofa. *Abdurahman Wahid Selama Era Lengser*. Yogyakarta, 2002.
- Bisri K.H. Mustafa. *Beyond The Simbol*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Choirie Efendi. *PKB Politik Jalan Tengah NU*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002.
- Deliar Noer. *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Jakarta : Rajawali, 1983.
- Hasyim Umar. *Mencari Ulama Pewaris Nabi: Selayang Pandang Sejarah Para Ulama Surabaya* : Bina Ilmu, 1989.

- Ismail Faisal. *Islamic Triadisionalism in Indonesia : A Study of the Nahdlatul Ulama 's Early History and Religious Ideology*, Yogyakarta : LESFI, 2003.
- Ismail Faisal. *Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik*, Jakarta :Perpustakaan Nasional Katalog dalam terbitan (KDT), 2004.
- Karim A. Ghaffar. *Metamorfosis : NU dan Politisi Islam Indonesia*, Yogyakarta : LKiS, 1984.
- Mas'udi Farid Masdar. *Agama Keadilan :risalah zakat (Pajak)dalam Islam*, Jakarta : P3M, 1993.
- Mohammad Tohadi dan Ahmad Hakim Jailly. *PKB dan Pemilu 2004*, Jakarta: Lembaga Pemenangan Pemilu PKB, 2003.
- Mufid Achmad. *Ada Apa Dengan Gus Dur*, Yogyakarta: Kutub, 2005.
- Muslim Romdono. *Tokoh Muslim Indonesia*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- P Siagian Sondang. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Ridjaluddin. *Demokrasi Pemikiran Gus Dur dan Keterpaduannya Dengan Demokrasi Amien Rais Dan Syafi' Ma'arif*, Jakarta, 2004.
- Sarwono Wirawan Sarlito. *Teori Psikologi Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tara Dainy Azwir. *Peran Pengusaha Dalam Membangun Demokrasi*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- Vall Esposito-Jhon O Jhon L. *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Wahid Abdurahman. *Membangun Demokrasi*, Editor Zaeni Shofari Al-Raef, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1999.

Wahid Abdurrahman. *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: Grasindo, 1997.

Wahid Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS, 1999.